

# RAPBN 2027:

## MENJAGA KREDIBILITAS FISKAL UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Dr. M. Rizal Taufikurahman

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF

Dipresentasikan pada Diskusi Publik Bertajuk: **Dayabeli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan**. Diselenggarakan oleh INDEF.



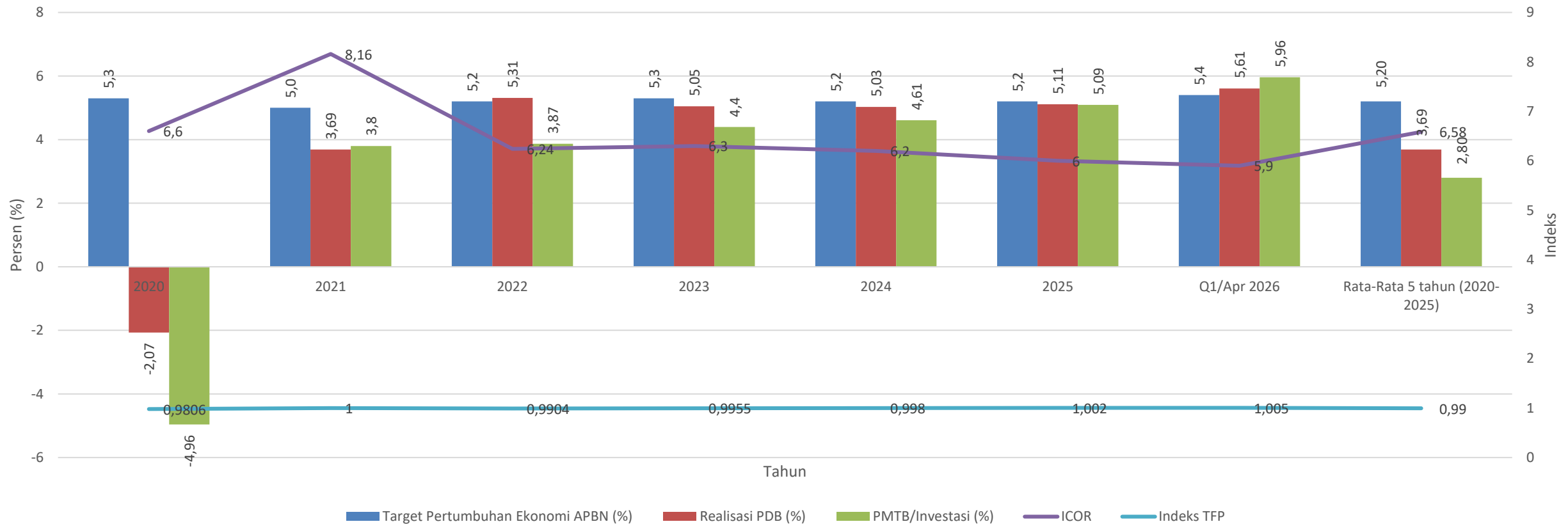
Jakarta, 14 Juni 2026

# Outline Slide pada Paparan

- 1 Pendahuluan: RAPBN 2027 Dalam Lanskap Ekonomi Terkini
- 2 Tantangan Makroekonomi yang Dihadapi RAPBN 2027
- 3 Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Energi: Peluang dan Risiko
- 4 Menjaga Kredibilitas Fiskal: Pilar Utama RAPBN 2027
- 5 RAPBN 2027: Instrumen Transformasi dan Perlindungan Daya Beli
- 6 Penutup: Rekomendasi dan Implikasi

# Pendahuluan: RAPBN 2027 Dalam Lanskap Ekonomi Terkini

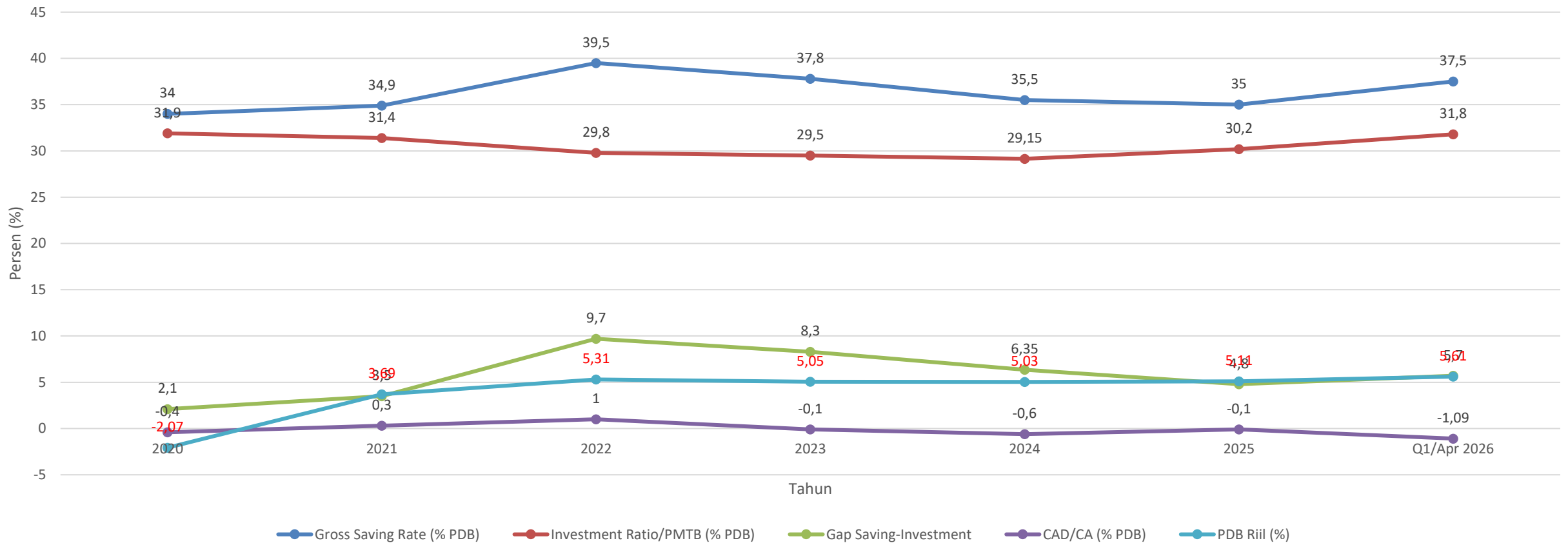
- **Tantangan RAPBN 2027 bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi**, tetapi meningkatkan efisiensi investasi dan produktivitas sehingga setiap rupiah belanja negara mampu menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.
- **Arah kebijakan RAPBN 2027 harus mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan dan disiplin fiskal.** Namun, pencapaian target pertumbuhan 5,8–6,5% akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi swasta, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan efektivitas belanja negara sehingga mampu mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.



Sumber: Kemenkeu, BPS, CEIC, Penn World Table/FRED (basis 2021=1)

# Tantangan Makroekonomi yang Dihadapi RAPBN 2027

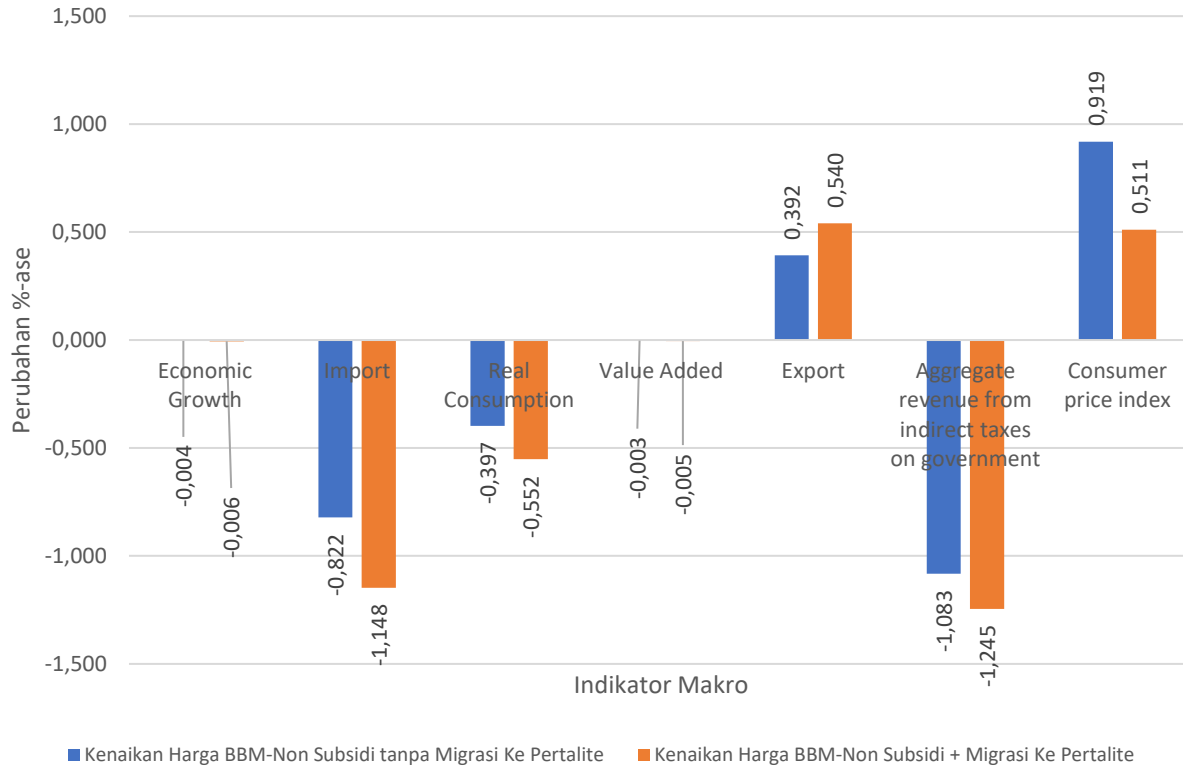
- **Dari sisi eksternal:** perlambatan ekonomi global, tingginya suku bunga internasional, ketidakpastian harga energi dan pangan, serta meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia berpotensi menekan ekspor, arus investasi, dan stabilitas pasar keuangan Indonesia.
- **Dari sisi domestic:** pelemahan daya beli kelas menengah, meningkatnya biaya pembiayaan pemerintah akibat suku bunga yang tinggi, perlambatan investasi swasta, dan penurunan produktivitas industri menjadi tantangan utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam RAPBN 2027.



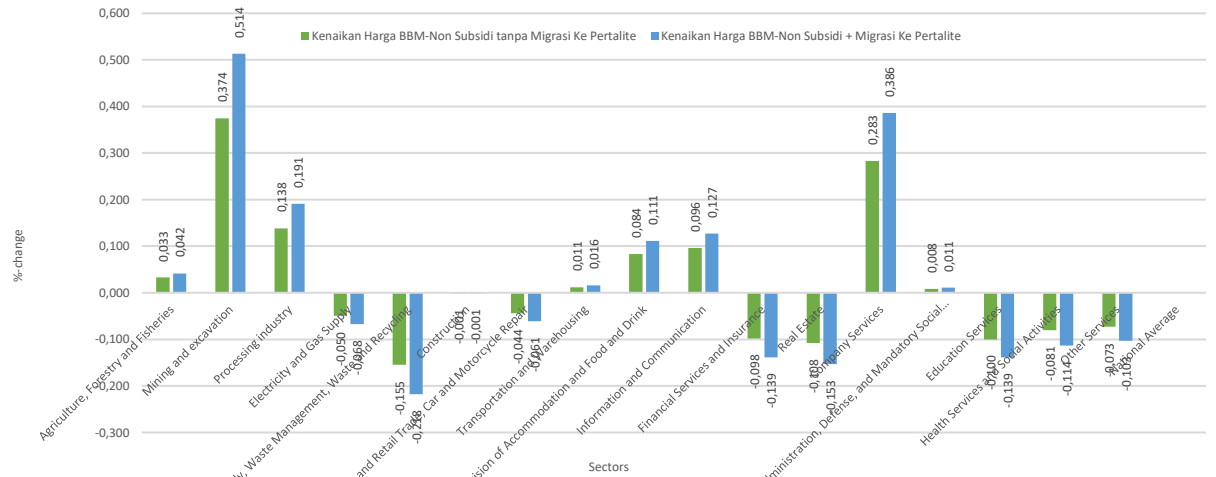
Sumber: Kemenkeu, BPS, dan CEIC

# Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Energi: Peluang dan Risiko

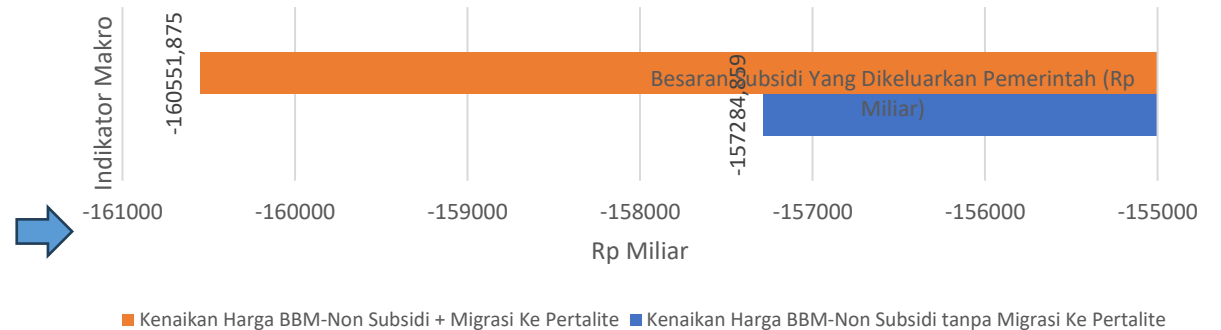
## Dampak Kebijakan Pengurangan Subsidi Energi Untuk BBM-Nonsubsidi Terhadap Kinerja Ekonomi



- Kenaikan BBM non-subsidi lebih berdampak pada pelemahan konsumsi dan penurunan penerimaan fiskal daripada pertumbuhan ekonomi.
- Sementara itu, migrasi ke Peralite mampu meredam inflasi, tetapi meningkatkan tekanan terhadap konsumsi domestik dan kapasitas fiskal pemerintah, sehingga secara keseluruhan menciptakan trade-off dalam stabilitas makroekonomi.
- **Migrasi konsumen dari BBM non-subsidi ke Peralite berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah, sehingga total subsidi yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar dibandingkan skenario tanpa perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi.**



**Mendorong inflasi terutama pada sektor energi, pertambangan, konstruksi, dan transportasi, namun sekaligus menekan permintaan agregat pada sektor jasa dan perdagangan. Melemahnya konsumsi rumah tangga dan perlambatan aktivitas ekonomi, khususnya apabila tidak diimbangi oleh kebijakan perlindungan daya beli dan efisiensi biaya logistik.**



Sumber: Perhitungan Model CGE (Juni 2026)

Simulasi Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi (Pertamax, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex)



## Optimalisasi Penerimaan Negara

Memperluas basis pajak dan menerapkan digitalisasi administrasi serta peningkatan PNBPN secara menyeluruh.



## Efisiensi Belanja (*Spending Better*)

Fokus pada kualitas hasil belanja dan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang produktif.



## Pengelolaan Defisit dan Utang

Menjaga defisit tetap terukur melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko utang.



## Reformasi Fiskal Daerah

Memperkuat kualitas Transfer Ke Daerah (TKD) dengan fokus pada belanja berbasis hasil.

# RAPBN 2027: Instrumen Transformasi dan Perlindungan Daya Beli

RAPBN 2027 fokus pada dua pilar: menjaga daya beli masyarakat sebagai mesin pertumbuhan melalui stabilitas harga dan bantuan tepat sasaran, serta mengarahkan belanja negara sebagai instrumen transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.

## Strategi Perlindungan Daya Beli



### Stabilisasi Harga & Bantuan Tepat Sasaran

Prioritas menjaga inflasi pangan, harga energi, dan penyaluran bantuan sosial yang efektif.



### Penguatan UMKM & Lapangan Kerja

Pemberian insentif sektor padat karya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.



## Belanja untuk Transformasi Ekonomi



### Ketahanan Nasional & Hilirisasi



Belanja diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, dan kemandirian energi.



### Investasi Masa Depan & SDM



**Digitalisasi Ekonomi**



**Penguatan Kualitas SDM**



**Transisi Ekonomi Hijau**

Fokus pada digitalisasi ekonomi, penguatan kualitas SDM, dan transisi ekonomi hijau.

### APBN Sebagai Instrumen Transformasi

APBN bukan sekadar biaya rutin, melainkan alat pendorong perubahan struktur ekonomi.



## Tiga Pilar Strategis RAPBN 2027



### Stabilitas Fiskal & Kepercayaan Investor

Menjaga defisit dan utang tetap terkendali untuk mempertahankan kredibilitas pasar.



### Penguatan Pertumbuhan Ekonomi

Memperkuat sinergi antara konsumsi, investasi, dan ekspor secara seimbang.



### Transformasi Struktural

Mendorong industrialisasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.



## Tolok Ukur Keberhasilan



### Kredibilitas & Daya Beli

Keberhasilan diukur dari perlindungan daya beli masyarakat dan kredibilitas fiskal.



### Pertumbuhan Inklusif

Mempercepat transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.



# Terima Kasih

*rizal@indef.or.id*